



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

# Digitalisasi UMKM untuk Meningkatkan Ekonomi dan Pencapaian *SDGs*

Prof. Dr. Drs. **Nur Feriyanto**, M.Si.

Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen  
Jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Pidato Pengukuhan Guru Besar  
Sidang Terbuka Senat  
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 29 November 2021

# **Digitalisasi UMKM untuk Meningkatkan Ekonomi dan Pencapaian SDGs**

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati:

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Ketua Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
3. Ketua dan Anggota Senat Universitas Islam Indonesia.
4. Ketua dan Anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia.
5. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Jajaran Pimpinan Fakultas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia.
8. Para undangan tamu, keluarga dan sejawat, hadirin yang saya muliakan.

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar dengan judul:

## Digitalisasi UMKM untuk Meningkatkan Ekonomi dan Pencapaian SDGs

Peranan UMKM dalam perekonomian nasional sangat penting. Selama periode 2015-2019, setiap tahunnya jumlah UMKM semakin meningkat dimana pada tahun 2015 jumlah UMKM sebesar 59.262.772 unit kemudian menjadi 65.465.497 unit pada tahun 2019. Adanya kenaikan unit UMKM berarti telah terjadi kenaikan investasi juga. Unit usaha UMKM didominasi oleh usaha mikro, terlihat pada tahun 2019 jumlah unit usaha mikro sebesar 64.601.353 unit atau 98,67 persen. Sedangkan usaha kecil dan usaha menengah masing-masing sebesar 798.679 unit (1,22 persen) dan 65.465 unit (0,10 persen). Jika dibandingkan dengan usaha besar, unit UMKM memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan unit usaha besar. Dari tahun 2015 sampai 2019 terlihat bahwa unit usaha UMKM mencapai 99,99 persen dari total unit usaha untuk setiap tahunnya, sisanya sebesar 0,01 adalah unit usaha besar (**Tabel 1**).

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja di Indonesia didominasi oleh UMKM. Penyerapan tenaga kerja di Indonesia oleh UMKM selama tahun 2015-2019 rata-rata mencapai 96,90 persen sedangkan usaha besar hanya sekitar 3 persen. Suatu perbedaan yang sangat mencolok dari kemampuan penyerapan tenaga kerja antara UMKM dan usaha besar (UB). (**Gambar 1**).

Lebih detail dapat dicermati bahwa penyerapan tenaga kerja oleh UMKM didominasi oleh usaha mikro, di mana penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh usaha mikro rata-rata pertahun selama tahun 2015-2019 adalah sebesar 88,41 persen, melebihi usaha kecil (5,09 persen) dan usaha menengah (3,39 persen). Sementara untuk tahun 2020 dan 2024 diproyeksikan penyerapan tenaga kerja di kisaran 5-10 persen. (**Tabel 2**).

Kontribusi UMKM terhadap PDB menunjukkan bahwa sektor UMKM memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan sektor

usaha besar, dengan perbandingan UMKM memberikan kontribusinya terhadap PDB sekitar 60% sedangkan usaha besar hanya 40%. (**Gambar 2**).

Terlihat bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB konsisten di sekitar angka 60 persen pada tahun 2015-2019. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap PDB didominasi oleh usaha mikro dengan kontribusi rata-rata sebesar 36 persen/tahun selama periode 2015-2019. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memproyeksikan kontribusi UMKM terhadap PDB tahun 2020-2024 tumbuh dikisaran 33,88 persen-59,56 persen (**Tabel 3**).

## **Bapak dan Ibu yang saya hormati**

### **UMKM Mengalami Hantaman Pandemi COVID-19**

Dampak pandemi COVID-19 yang berlangsung lebih dari satu tahun telah menekan kondisi ekonomi dan HDI Indonesia. Segala sumber daya telah digunakan untuk menekan dampak buruk pandemi COVID-19 di Indonesia. Padahal tuntutan kemajuan ekonomi dan HDI Indonesia agar terus membaik merupakan tantangan yang tidak mudah dicapai yang membutuhkan kerja keras, kerja cerdas serta kerja sama pemerintah dan elemen masyarakat Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang menurun setelah terjadi pandemi COVID-19 menimpa negara ini, jumlah orang miskin dan pengangguran terus meningkat serta kualitas hidup dan kualitas pembangunan manusia yang menurun menjadi dampak yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kita juga masih memiliki kewajiban dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Di sisi bisnis, UMKM yang menjadi salah satu pilar penting dalam ekonomi nasional juga mengalami pukulan yang berat akibat pandemi COVID-19, jauh lebih berat dari krisis-krisis sebelumnya yang menimpa negara ini.

Hasil kajian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan bersama Boston Consulting Group (OJK-BCG *Joint Research*, 2020) kepada 3.136 pelaku UMKM, menghasilkan kesimpulan bahwa 75 persen

responden menjawab bahwa COVID-19 lebih berdampak buruk dibandingkan krisis-krisis sebelumnya. Beberapa alasan utama responden yang menganggap COVID-19 lebih berdampak buruk yakni: 1) COVID-19 merupakan fenomena global, dengan tingkat infeksi yang sangat tinggi, sehingga menimbulkan rasa takut dan kepanikan di masyarakat; 2) di Indonesia, pemerintah memberlakukan pembatasan sehingga membatasi mobilitas masyarakat untuk keluar rumah; 3) daya beli masyarakat yang rendah karena adanya rasa pesimis akan masa depan dan 4) dengan kondisi pandemi ini, seluruh perekonomian terkena dampak negatif, baik dari sisi *supply* maupun *demand* (**Gambar 3**).

Dampak negatif juga terlihat dari penurunan omzet UMKM. Telihat pada **Gambar 4** bahwa sekitar 80 persen UMKM mengalami penurunan omzet akibat pandemi COVID-19. Sektor yang berdampak besar karena pandemi COVID-19 adalah sektor jasa, makanan dan minuman, transportasi dan pergudangan dengan persentase sebesar 24-25 persen yang mengalami penurunan omzet lebih dari 50 persen.

Jika dilihat lebih dalam, jenis usaha mikro dari UMKM merupakan sektor yang paling terdampak adanya pandemi COVID-19. Sebesar 27 persen usaha mikro mengalami penurunan omzet lebih dari 50 persen, sedangkan untuk usaha kecil dan usaha menengah masing-masing sebesar 15 persen dan 10 persen yang mengalami penurunan omzet lebih dari 50 persen (**Gambar 5**).

Berdasarkan tingkat digitalisasi, baik pada golongan usaha tradisional (tidak menggunakan platform digital), *offline-online* (memanfaatkan platform pihak ketiga untuk menemukan pemasok/pelanggan), maupun *tech-savvy* (proses bisnis terdigitalisasi) dampak yang dirasakan akibat adanya pandemi COVID-19 cukup merata. Penurunan omzet lebih dari 51 persen, terbesar terdapat pada golongan *offline-online* yakni sebanyak 26 persen UMKM, kemudian golongan tradisional sebesar 20 persen UMKM dan terendah adalah golongan *tech-savvy* sebesar 19 persen UMKM. Hasil ini tentunya dapat menjadi perhatian bahwa digitalisasi

merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan UMKM untuk dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini (**Gambar 6**).

Pandemi COVID-19 memberikan kendala yang signifikan bagi para pelaku UMKM pada setiap area bisnis, yang meliputi penjualan, pendanaan, operasional, dan pasokan, dengan kendala utama terletak pada area penjualan (44 persen) dan pendanaan (27 persen). Kendala utama pada **penjualan** terletak pada daya beli masyarakat yang menurun, adanya protokol kesehatan yang menghambat penjualan serta kurangnya interaksi fisik. Kemudian pada **pendanaan**, kendala yang dialami UMKM yakni: sulitnya mendapatkan dana/ arus kas masuk, pelanggan mengalami keterlambatan pembayaran bahkan tidak mampu membayar dan sulitnya membayar tagihan pinjaman (**Gambar 7**).

Pada saat awal pandemi COVID-19 (Triwulan I tahun 2020) sampai Triwulan IV tahun 2020, pertumbuhan produksi industri Menengah Kecil (y-on-y) mengalami penurunan yang besar. Triwulan I/2020 yaitu -12,77 persen; Tw II/2020 sebesar -21,31 persen; Tw III/2020 sebesar -18,92 persen dan pada Tw IV/2020 sebesar -17,51 persen. Penurunan produksi IMK tentunya berimbas pada penutupan IMK. Sampai akhir tahun 2020, sekitar 7,06 persen usaha IMK tutup, dan sebesar 11,25 persen tutup sementara (Dafei et al., 2020). (**Gambar 8**).

Jika dilihat pertumbuhan produksi IMK menurut provinsi (**Tabel 4**), **sebagian besar provinsi merasakan dampak COVID-19, hanya beberapa provinsi saja yang pertumbuhan produksi masih positif**. Pada **Triwulan I tahun 2020**. Terlihat beberapa provinsi masih tumbuh positif, di antaranya: Sulawesi Barat (22,12 persen), Jawa Timur (6,15 persen), Kepulauan Riau (5,53 persen) dan Papua (2,99 persen). Namun terdapat beberapa provinsi mengalami dampak yang cukup parah dari adanya pandemi COVID-19 seperti: Bali (-21,09 persen), Kepulauan Bangka Belitung (-18,49 persen) dan NTB (-17,44 persen).

Pada **Triwulan II tahun 2020**, pertumbuhan produksi IMK masih relatif sama. Provinsi dengan dampak terparah adalah DKI Jakarta dengan pertumbuhan produksi sebesar -30,61 persen, diikuti Provinsi Bali dan Maluku dengan pertumbuhan produksi IMK masing-masing sebesar -28,39 persen dan -26,31 persen. Sedangkan provinsi yang masih tetap tumbuh positif adalah Provinsi Sulawesi Barat (13,27 persen), Maluku Utara (2,33 persen), dan Kepulauan Riau (1,89 persen).

Pada **Triwulan III tahun 2020**, DKI Jakarta masih merupakan provinsi dengan dampak terparah, diikuti Maluku dan Bali, dimana masing-masing mengalami kontraksi sebesar -28,61 persen, -26,07 persen dan -25,61 persen. Sedangkan provinsi yang mampu tetap tumbuh adalah Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan produksi IMK sebesar 11,69 persen, diikuti Sulawesi Barat (9,81 persen) dan Papua yang kembali mencatatkan pertumbuhan produksi IMK yang positif sebesar 8,44 persen.

Pada **Triwulan IV tahun 2020** semakin banyak provinsi yang mampu beradaptasi dengan pandemi COVID-19, terlihat dengan semakin banyaknya provinsi yang mengalami pertumbuhan produksi IMK yang positif, seperti Sulawesi Tengah (19,18 Persen), Sulawesi Barat (10,13 persen), Sulawesi Selatan (7,79 persen), Papua (7,61 persen), Bengkulu (6,55 persen), Maluku Utara (3,56 persen), Papua Barat (2,19 persen), Jawa Timur (1,84 persen), dan Sulawesi Tenggara (0,92 persen).

Hantaman COVID-19 pada UMKM di Indonesia membuat semua pihak bergerak mengantisipasi dampak lebih buruknya. Pemerintah, pelaku UMKM dan elemen masyarakat peduli UMKM berupaya keras membuat UMKM lebih kuat dan bisa keluar dari tekanan akibat COVID-19 tersebut. Era revolusi industri 4.0 juga menjadi momentum untuk memperkuat UMKM nasional.

## Bapak dan Ibu yang Berbahagia

### Momentum Revolusi Industri 4.0

Teknologi digital menjadi salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan lini usaha mereka di era revolusi industri 4.0. Saat ini perkembangan industri tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan sektor industri yang beriringan dengan perkembangan teknologi tentunya dapat membawa dampak yang positif pada suatu negara, salah satu dampak positifnya adalah pada peningkatan perekonomian negara tersebut.

Jika dikaji lebih dalam sebenarnya era ekonomi digital, sudah berlangsung mulai dari tahun 1980-an. Ketika pelaku bisnis berusaha melakukan efisiensi bisnis. Hadirnya *personal computer* (PC) dan internet menjawab kebutuhan pelaku bisnis. Digunakannya PC dan internet telah memunculkan era perdagangan elektronik yang dikenal dengan istilah *e-commerce*. Perkembangan teknologi yang begitu cepat kemudian membawa bisnis memasuki era *new digital economy*. Hal ini ditandai di antaranya dengan adanya *mobile technology*, akses internet yang tidak terbatas, serta kehadiran teknologi *cloud* yang digunakan dalam proses ekonomi digital (Van Ark *et al.* 2016).

Pemerintah juga harus berperan aktif dalam era *new digital economy* ini. Sudah seharusnya pemerintahan mendukung penuh kemajuan ilmu dan teknologi yang akan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi negara. Pilihan program yang diluncurkan harus dapat mendorong perusahaan memanfaatkan teknologi yang akan membuat mereka lebih pintar dan lebih baik. Pemerintah harus memelopori terjadinya *digital transformation* dalam bisnis, sehingga terjadi pemanfaatan teknologi digital untuk mengubah proses bisnis yang sudah ada atau menciptakan bisnis baru yang lebih efisien dan efektif.

Era revolusi industri 4.0 yang serba digital ini tentunya menuntut kualitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kemampuan SDM terhadap kebutuhan teknologi digital tidak dapat

dielakkan lagi. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah kebutuhan masa kini dan masa mendatang dalam bisnis dan kehidupan masyarakat.

*Flowchart* dari industri TIK di Indonesia, bermula dari munculnya tren teknologi yang akan diaplikasikan dalam bisnis. Dari sana, barulah akan ada perubahan dalam aspek lingkungan industri yang mendorong pemerintah dalam membuat regulasi-regulasi baru. Regulasi ini juga akan dipengaruhi oleh regulasi yang sudah diterapkan oleh negara-negara lain. Tujuan akhirnya adalah terciptanya *social life* yang lebih modern, maju, dan digital (Binus University, 2020).

Era revolusi industri 4.0 membuka kesempatan bagi **sumber daya manusia** (SDM) di sektor manufaktur untuk memiliki keahlian yang sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Pelaksanaan program peningkatan keterampilan (*up-skilling*) atau pembaruan keterampilan (*reskilling*) untuk para tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dunia industri saat ini menjadi suatu kebutuhan. Di dalam *Roadmap Making Indonesia 4.0*, salah satu program prioritasnya adalah peningkatan kualitas SDM. Sebab, *talent* menjadi kunci atau faktor penting untuk kesuksesan implementasi industri 4.0.

Kebutuhan pembangunan **infrastruktur digital** perlu terus diakselerasi untuk mempercepat proses penggunaan teknologi digital. Beberapa program dapat dijalankan di antaranya penguatan *broadband speed* dan kemampuan digital. Melakukan investasi pada *platform* digital, misalnya *cloud computing*, *data center*, serta *security management*.

Di samping itu **teknologi digital** diperlukan guna membangun konektivitas yang terintegrasi di seluruh rantai nilai proses produksi. Industri 4.0 dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga akan dapat menekan biaya produksi yang akan berdampak meningkatkan daya saing produk di pasar. Jika implementasi *Making Indonesia 4.0* sukses, maka diprediksi akan mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil sebesar 1-2 persen per tahun, sehingga pertumbuhan PDB per tahun akan naik

dari *baseline* sebesar 5 persen menjadi 6-7 persen selama tahun 2018-2030.

Terkait penerapan industri 4.0 terhadap sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Kemenperin telah melatih keterampilan pelaku IKM melalui *workshop e-Smart IKM* agar para pelaku IKM bisa memanfaatkan *marketplace* yang ada. Hingga saat ini, program *e-Smart IKM* ini telah diikuti lebih dari 4.000 IKM. Pemberdayaan IKM melalui teknologi digital ini juga merupakan salah satu prioritas dalam *Making Indonesia 4.0* (Kementerian Perindustrian, 2018).

Tingkat digitalisasi bisnis UMKM di Indonesia masih sangat rendah pada awalnya, hanya kurang dari 15% yang pernah memanfaatkan *platform digital*. Laporan resmi tahun 2020 mengungkapkan sebanyak 9,4 juta UMKM telah *go digital*, dari target pemerintah 10 juta UMKM telah menggunakan digitalisasi pada bisnisnya di akhir 2020 (OJK-BCG *Joint Research*, 2020).

Dari **sisi finansial**, terlihat bantuan finansial paling diharapkan oleh pelaku UMKM adalah subsidi operasional (60%), kemudian diikuti oleh subsidi jasa penyedia solusi teknologi (50 persen), insentif penggunaan platform digital (50 persen), subsidi alat IT/digital (46 persen), subsidi biaya ekspor/impor (34 persen), subsidi asuransi (29 persen) dan tidak tertarik (3 persen). Tiga dari enam bantuan finansial ini mengarah pada solusi digitalisasi, yang secara tidak langsung menjelaskan persepsi yang sangat positif dari para pelaku UMKM untuk segera mengaplikasikan digitalisasi dalam rangka menunjang operasi bisnis mereka (OJK-BCG *Joint Research*, 2020) (**Gambar 9**).

Sedangkan pada **sisi non-finansial**, *training platform digital* merupakan bantuan yang paling diharapkan oleh UMKM dalam menunjang bisnis mereka. Hal ini semakin mempertegas keinginan UMKM dalam peningkatan dalam teknologi digital. (**Gambar 10**),

Digitalisasi yang hanya dilakukan pada mencari pemasok dan menjangkau pelanggan dengan tingkat persentase di atas 60 persen, UMKM telah melakukan tujuan ini. Sedangkan pemanfaatan digital

yang lebih lanjut seperti digitalisasi proses bisnis dan penggunaan teknologi digital dan analitik, masih kurang dari 30 persen UMKM melakukan tujuan ini (**Gambar 11**).

Dari sisi pemangku kebijakan, kerjasama Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2021) telah membagi kebijakan pemberdayaan UMKM menjadi 3 pilar utama, yaitu Pilar 1: Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi UMKM; Pilar 2: Lembaga Keuangan yang Ramah UMKM; dan Pilar 3: Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor untuk Mendukung Ekosistem UMKM, seperti terlihat pada **Gambar 12**.

Juga disusun **6 strategi** yakni perluasan akses pasar, peningkatan daya saing, pengembangan kewirausahaan, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha dan kordinasi lintas sektoral. Keenam strategi tersebut membutuhkan dukungan program-program digitalisasi, baik dari digitalisasi keuangan, digitalisasi pemasaran, ataupun digitalisasi lembaga pendukung kegiatan bagi UMKM lainnya, misalnya lembaga keuangan yang melayani pembiayaan dan investasi. Untuk menghindari penyalahgunaan teknologi digital di bisnis UMKM maka implementasi bisnis perlu didukung dengan etika bisnis dan penegakan hukum.

## **Bapak dan Ibu yang Dirahmati Allah**

### **Kontribusi UMKM untuk Meningkatkan Ekonomi, dan Pencapaian SDGs**

Pada tanggal 25 September 2015, negara negara anggota PBB mengangkat rangkaian agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. *SDGs* terdiri dari: (1) Tanpa kemiskinan; (2) Tanpa kelaparan; (3) Kehidupan sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan berkualitas; (5) Kesetaraan gender; (6) Air bersih dan sanitasi layak; (7) Energi bersih dan terjangkau; (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) Industri, inovasi, dan infrastruktur;

(10) Berkurangnya kesenjangan; (11) Kota dan pemukiman yang berkelanjutan; (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) Penanganan perubahan iklim; (14) Ekosistem laut; (15) Ekosistem daratan; (16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan. (Kementerian PPN/Bappenas, 2017). (**Gambar 13**)

Bisnis UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang besar berarti bisnis UMKM juga ikut membantu menurunkan pengangguran, hal ini berdampak menurunkan tingkat kemiskinan. Menurunnya *unemployment rate* atau naiknya *employment rate* akan sangat membantu pemerintah dalam menekan tingkat kemiskinan yang selalu menjadi beban pembangunan nasional. Penurunan *unemployment* dan menaikkan *real GRDP* terbukti dapat menurunkan kemiskinan. (Nyasha, et al., 2017; Feriyanto et al., 2020). Artinya tujuan mengentaskan segala bentuk kemiskinan merupakan **SDG 1**.

Penyerapan tenaga kerja, dan investasi akan dapat memberikan efek positif terhadap *Human Development Index* nasional, dimana HDI merupakan cerminan kemajuan pembangunan manusia atau kesejahteraan di Indonesia (Feriyanto, 2016). Artinya majunya UMKM yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan penambahan investasi akan dapat mendorong HDI meningkat. Menjamin kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua di segala usia adalah **SDG 3**. Menjamin pendidikan yang inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua merupakan **SDG 4**.

Prospek UMKM ke depan di era digital (industri 4.0) dan *New Normal* melalui digitalisasi UMKM akan berkembang lebih baik. Melalui keunggulan-keunggulan yang dimiliki UMKM, seperti besarnya kontribusi UMKM dalam PDRB, penyerapan tenaga kerja yang besar dan jumlah unit serta penyebaran usahanya dan investasi yang dilakukan UMKM akan memberikan efek positif bagi penyerapan tenaga kerja. Investasi baik PMDN atau PMA terbukti telah dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di setiap provinsi di Indonesia (Feriyanto & Sriyana, 2016). Artinya kontribusi

UMKM pada PDRB dan investasi UMKM yang dapat menyerap tenaga kerja mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua merupakan **SDG 8**.

UMKM yang dapat berkembang akan berdampak positif pada kondisi sosial ekonomi nasional karena dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja tersebut, yang berarti juga akan memberikan efek pada penurunan tingkat pengangguran di Indonesia (**Feriyanto, 2018**). Artinya efek digitalisasi UMKM yang dapat meningkatkan PDRB di setiap provinsi di Indonesia telah ikut membantu pemerintah dalam memecahkan persoalan ekonomi yaitu penurunan tingkat pengangguran, yang di Indonesia sudah mencapai level 7,07%/ tahun (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal itu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua merupakan **SDG 8**.

Digitalisasi UMKM juga akan meningkatkan pendapatan UMKM, sehingga akan memberikan kontribusi positif terhadap PDRB. Faktor pendapatan per capita sebagai bagian dari *Human Development Index* terbukti memberikan pengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. (**Feriyanto, 2019**). Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua merupakan **SDG 8**.

Majunya pariwisata di suatu daerah akan dapat mengundang wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan asing, baik untuk mengunjungi obyek wisata yang menarik maupun untuk membeli cendera mata yang dihasilkan UMKM dari daerah tersebut dan sekitarnya. Peranan faktor-faktor ekonomi dan pariwisata, terbukti dapat meningkatkan *real GRDP* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu pemerintah daerah harus terus penggali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *real GRDP* di daerahnya, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah daerah akan dapat mengakselerasi perkembangan ekonomi di daerahnya.

Investasi domestik terbukti dapat meningkatkan *real GDP* atau *real GRDP* (Aziri, 2017; Makuyana dan Odhimano, 2017; Feriyanto, 2020). Begitu pula jumlah turis yang datang disuatu provinsi atau negara akan berdampak positif pada *real GRDP* atau *real GDP*. (Adamopoulos dan Thalassinos, 2020; Feriyanto, 2020). Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua merupakan **SDG 8**.

Kegiatan *fintech* pada usaha-usaha kecil menengah di masyarakat, terbukti terakselerasi dengan cepat dengan adanya digitalisasi UMKM. Hal ini didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Perbankan yang menjadi ujung tombak lembaga penyalur dana terbukti semakin dekat ke masyarakat melalui produk-produk bank bagi penyaluran dana bagi UMKM berbasis digital. Hal ini tentunya suatu kondisi yang sangat bagus bagi perkembangan *fintech* di Indonesia, baik di kota-kota besar atau bahkan di pelosok desa melalui bank-bank daerah. (Tim Penentuan Strategi Kebijakan Pengembangan UMKM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, 2021). Membangun infrastruktur berketahanan mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi merupakan **SDG 9**.

Di samping itu perkembangan *digital marketing* yang sudah dimulai sebelum terjadinya COVID-19 terbukti telah mewarnai bisnis UMKM di antaranya melalui penjualan produk secara *offline* dan *online*, karena adanya dukungan akses terhadap TIK dan akses internet yang terjangkau. Perkembangan *hybrid marketing* ini juga menjadikan kegiatan bisnis berbasis digital juga telah berkembang pesat di masyarakat, misalnya pembuatan *marketplace*, *branding*, *packaging* dan inovasi lainnya, sebagai bagian kegiatan industri. Hal itu juga telah menjadikan penjualan produk UMKM bisa bergerak lebih leluasa walaupun terhantam COVID 19 yang telah menekan dan membatasi mobilitas manusia (Feriyanto et al., 2021). Membangun infrastruktur berketahanan mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi merupakan **SDG 9**.

Pengembangan *e-Logistic* yang terintegrasi dengan *e-Commerce* dan *fintech* merupakan perbaikan akses yang diperlukan bagi UMKM mengingat munculnya banyak persoalan penjualan produk ternyata disebabkan karena kurang lancarnya *supply* bahan baku mengalir dari produsen ke konsumen bahan baku yaitu UMKM, serta pembiayaan dan pembayarannya. Dampaknya jumlah produksi menjadi kurang dapat maksimal yang berefek pada kurang mampunya bisnis UMKM memenuhi permintaan, baik dari pasar domestik maupun ekspor (**Feriyanto et al., 2019**). Membangun infrastruktur berketahanan mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi merupakan **SDG 9**.

Digitalisasi pemasaran harus terus dikembangkan untuk membutuhkan ketersediaan *website* bagi kebutuhan UMKM. Baik *website* yang dimiliki produsen UMKM maupun milik Pemerintah daerah yang menjadi media promosi dan ‘komunikasi’ antara produsen produk dengan konsumennya. Seringkali terjadi fungsi *website* menjadi kurang efektif karena *website* yang sudah tersedia kurang dapat mendukung kebutuhan dari perkembangan UMKM ke depannya. Hal ini terjadi karena malasnya pemilik *website* melakukan *update* data terhadap informasi terkait UMKM, komunikasi yang terhambat antara konsumen/pengguna dan pemilik *website*, atau rendahnya kapasitas, dan kualitas *website*. (**Sugandini et al., 2018**). Kondisi ini harus segera diperbaiki agar bisnis UMKM terdukung oleh *website* yang handal karena kuatnya infrastruktur digital dan terkini kondisinya. Membangun infrastruktur berketahanan mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi merupakan **SDG 9**.

Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM baik di kota sampai desa sangat penting. Banyak UMKM di daerah dapat maju justru karena memiliki keunggulan berbasis bahan baku lokal, sehingga produk lokalnya sangat spesifik dan memiliki ciri khas daerah tersebut. Keunggulan UMKM berbasis potensi lokal dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaannya dan sekaligus memanfaatkan kekuatan obyek-obyek wisata yang ada di daerah tersebut menjadi pariwisata berkelanjutan. (**Feriyanto, 2016**).

Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan merupakan **SDG 12**.

UMKM di pedesaan di samping terus mengembangkan bisnisnya dengan menggali potensi bahan baku lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumen juga menjadikan kegiatan proses produksi, dan pemasarannya menjadi bagian pengembangan pariwisata berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja, juga mendukung budaya dan produk lokal. Pengembangan diversifikasi pangan lokal berbasis agropolitan untuk penguatan ekonomi pedesaan serta mampu menopang kebutuhan produk pangan alternatif merupakan bisnis UMKM yang berkembang pesat di Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta. (Feriyanto et al., 2017). Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan merupakan **SDG 12**.

Pemberdayaan masyarakat untuk membantu pengembangan ekonomi melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal dapat dilakukan melalui pengembangan loyalitas wisatawan. Pengelola wisata dapat mendorong terbangunnya loyalitas yang tinggi bagi wisatawan, di antaranya melalui perbaikan infrastruktur, kemudahan akses, keamanan, keramahan, dan pemandu wisata yang profesional sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal. (Feriyanto, et al., 2019). Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan merupakan **SDG 12**.

### **Perspektif Islam Tentang Bisnis dan SDM Berkualitas**

- Allah Swt. menjadikan dan menyediakan bumi seisinya untuk dikelola sebagai investasi umat manusia (Q.S Al-A'raf ayat 10).

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١٠ -

Senungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber)

penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

- Pengembangan **bisnis** merupakan salah satu cara manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui perbaikan kondisi ekonomi melalui cara cara yang halal. (**Q.S An-Nissa' ayat 29-30**).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan **perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu**. Dan janganlah kamu **membunuh dirimu**; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا - ٣٠

Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan melakukan aniaya, maka Kami kelak akan **memasukkannya ke dalam neraka**. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

- Tetapi pengembangan **bisnis** hanya akan berhasil jika dikelola oleh orang yang ahli di bidangnya /bisnis.

HR. Al Buqori:

Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya maka tunggulah kehancurannya!

- Diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam mengembangkan **bisnis**. **SDM** tersebut harus memenuhi beberapa aspek seperti (1) Aspek Keilmuan (Q.S Al-Anbiyaa':7); (2) Aspek Ketakwaan (Q.S Al-Hujarat:13); (3) Aspek Pro Aktif (Q.S. Ar-Ra'd:11); (4) Aspek Sinergi (Q.S. An-Nissa': 71); (5) Aspek Produktivitas (Q.S Al-Jumu'ah: 10); (6) Aspek Sosial (Q.S Al-Maa'uun:1-3).

## Kesimpulan

1. Bisnis UMKM memiliki kekuatan dan fleksibilitas tinggi, khususnya besarnya kontribusi UMKM terhadap PDB atau PDRB, besarnya penyerapan tenaga kerja, jumlah unit usaha yang besar dan menyebar, serta investasinya yang besar.
2. Digitalisasi UMKM dalam beberapa bentuk, seperti digitalisasi pemasaran, keuangan, logistik, dan lainnya akan dapat membawa berkembangnya bisnis UMKM lebih baik melalui pemanfaatan potensi besar yang dimilikinya, tetapi harus disertai etika bisnis dan penegakan hukum dalam pelaksanaannya.
3. Masih terdapat kendala yang harus terus diperbaiki dalam diri UMKM, seperti belum tingginya kualitas SDM dalam manajemen bisnis, penguasaan dalam IT, kepemilikan peralatan pendukung digitalisasi, serta akses dan penguasaan keuangan.
4. Kemajuan bisnis UMKM akan meningkatkan perekonomian, dan pencapaian *SDGs*.
5. Perkembangan pariwisata serta ketersediaan *website* pemerintah daerah dan pelaku UMKM menjadi faktor pendukung pengembangan ekonomi, yang sangat tergantung pada majunya bisnis UMKM.
6. Allah Swt., menjadikan dan menyediakan bumi seisinya untuk dikelola sebagai investasi umat manusia (**Q.S Al-A'raf ayat 10**). Pengembangan bisnis merupakan salah satu cara manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui perbaikan kondisi ekonomi melalui cara cara yang halal. (**Q.S An-Nissa' ayat 29-30**). Tetapi pengembangan bisnis hanya akan berhasil jika dikelola oleh orang yang ahli dibidangnya /bisnis. (HR. Al Buqori). Diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengembangkan bisnis.

## **Bapak dan Ibu yang saya muliakan**

Mengakhiri pidato pengukuhan ini, perkenankanlah saya mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih saya. Sebagai dosen, saya tidak akan mampu menyanggah gelar Guru Besar pada hari ini, jika tidak dibantu dan didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berperan dalam pencapaian gelar ini. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya Almarhum Bapak Muhammad Hadoen Nawawi dan Ibu Wardiyah Hisyam, bapak dan ibu mertua Almarhum Bapak Fied Sudarminto dan Ibu Mufiedatun Chasanah, isteri Dyah Anggraini Dwi Putranti dan segenap anggota keluarga saya, serta kakak-kakak dan adik-adik.
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
3. Prof. Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Akt. selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta (2019-2021) beserta jajarannya.
4. Ketua Pembina, Pengawas, Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya.
5. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. dan para Wakil Rektor.
6. Ketua beserta Anggota Senat Universitas Islam Indonesia.
7. Ketua beserta Anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia.
8. Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D., Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D dan Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Dra. Siti Nursyamsiyah, M.M.

9. Ketua Jurusan Manajemen FBE UII, Arif Hartono, S.E., MHRM., Ph.D. beserta seluruh rekan dosen dan tenaga pendidik di Jurusan Manajemen FBE UII, Prodi Magister Manajemen FBE UII, dan Prodi Sarjana Manajemen FBE UII.
10. Ketua Jurusan Akuntansi FBE UII, Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. beserta seluruh rekan dosen dan tenaga pendidik di Jurusan Akuntansi FBE UII, Prodi Magister Akuntansi FBE UII, dan Prodi Sarjana Akuntansi FBE UII.
11. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FBE UII, Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D. beserta seluruh rekan dosen dan tenaga pendidik di Jurusan Ilmu Ekonomi FBE UII, Prodi Doktor dan Magister Ilmu Ekonomi FBE UII, dan Prodi Sarjana Ilmu Ekonomi FBE UII.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya.
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta beserta jajarannya.
14. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya.
15. Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.

Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada hadirin yang telah mengikuti pidato ini dengan penuh kesabaran dan saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan pidato ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Aamiin.

**Wabillahi taufik wal hidayah, Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.**

## Referensi

- Adamopoulos, A., Thalassinou, I.E. 2020. Tourism Development and Economic Growth: A Comparative Study for the G-6 Leaders. *European Research Studies Journal*, 23(1), 368-380. Doi: <https://doi.org/10.35808/ersj/1555>.
- Ark, B. van. (2016). Navigating the new digital economy: driving digital growth and productivity from installation to deployment. *The Conference Board*. <https://www.conferenceboard.org>
- Aziri, E. 2017. The Impact of Public Investment on Economic Growth in Republic of Macedonia. *RSP*, (56), 54-63. Retrieved from [search.proquest.com/docview/1987676108?accountid=62100](http://search.proquest.com/docview/1987676108?accountid=62100).
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>
- Binus University. (2020). *Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Bersinergi Dengan Revolusi Industri 4.0*. 17 October 2020. <https://dcs.binus.ac.id/2020/10/17/upaya-pengembangan-sumber-daya-manusia-yang-bersinergi-dengan-revolusi-industri-4-0/>
- Dafei, Y. D., Safrida, I. N., Ningrum, J., Adam, S. Y., Sukamto, A. & Fadillah, I. J. (2020). *Industri Mikro dan Kecil di Masa Pandemi COVID-19, 2020* (F. D. Rafei (ed.)). Badan Pusat Statistik. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Feriyanto, N. (2016). The Effect of Employment, Economic Growth, and Investment on HDI: In provinces in Indonesia. *Journal of Economics Business and Accountancy Ventura*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.14414/jebav.v19i1.537>
- Feriyanto, N. (2016). Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidorejo Kabupaten Purworejo Melalui Penguatan Kelembagaan Berbasis Pengembangan Potensi Lokal. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship, Volume 1 Issue 3*, pp 210-218.

- Feriyanto, N. (2018). Determinants of Unemployment in Regency/City in Special Province Yogyakarta. *European Research Studies Journal*, XXI(3), 367–380. <https://doi.org/10.35808/ersj/1388>
- Feriyanto, N. (2019). The Effect of The Quality of Human Development Factors on The Rate of Economic Growth In Yogyakarta Special Province. *International Journal for Quality Research*, 13(1), 157-176.
- Feriyanto, N. (2020). Economic and Tourism Factors Affecting the Real Gross Regional Domestic Product: A Case Study in Yogyakarta Special Province. *European Research Studies, Volume 23, Issues 3*, pp 736-756.
- Feriyanto, N., Aiyubbi, D. El & Nurdany, A. (2020). The Impact of Unemployment, Minimum Wage, and Real Gross Regional Domestic Product on Poverty Reduction in Provinces of Indonesia. *Asian Economic and Financial Review*, 10(10), 1088–1099. [doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.1010.1088.1099](https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.1010.1088.1099)
- Feriyanto, N., Aiyubbi, D. El & Firdaus, F. (2021). *Potensi Ekonomi Kabupaten Pacitan Jawa Timur*. Universitas Islam Indonesia.
- Feriyanto, N., Maharlika, I.F., & Firdaus, F. (2017). Diversifikasi Komoditas Pangan Unggulan Lokal Berbasis Agropolitan di Daerah Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta. *Teknoin*, 23 (2), 161-170.
- Feriyanto, N., Kot Sebastian., Sugandhi, D., & Muafi (2019). The Development of Community Based Tourism from Attractiveness to Loyalty, *Quality Access to Success*, Volume 20, Issues S1, 393-398.
- Feriyanto, N. & Sriyana, J. (2016). Labor Absorption Under Minimum Wage Policy In Indonesia. *Regional Science Inquiry*, VIII(1), 11–21.
- Feriyanto, N., Sugandini, D. & Muafi. (2019). Supply Chain Performance: The Study on Bamboo Craft SMEs in Special Region of Yogyakarta. *Quality-Access to Success*, 20(173), 43–47.

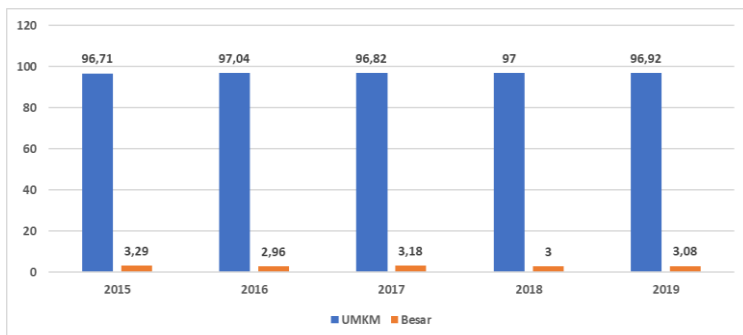
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024*.
- Kementerian Perindustrian. (2018). *Making Indonesia 4.0*. <https://kemenperin.go.id/iis2018>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2017). *Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Makuyana, G., Odhiambo, N.M. 2017. Public and Private Investment and Economic Growth in Zimbabwe: An empirical test. *Business and Economic Horizons*, 13(1), 60-76. Doi: <http://dx.doi.org/10.15208/beh.2017.05>.
- Nyasha, S., Gwenhure, Y., & Odhiambo, N. M. (2017). Poverty and economic growth in Ethiopia: A multivariate causal linkage. *The Journal of Developing Areas*, 51(1), 343-359.
- OJK-BCG Joint Research. (2020). *Bagaimana UMKM & Perbankan Dapat Sukses di Era Disrupsi Ekonomi dan Digital* (S. Yayuningsih, Y. Ramadiantio, J. F. Ananda, M. Butarbutar, S. Adhiarahmawati, Y. Hartono, Billi, G. Adiprawira, & P. Sidharta (eds.)). Otoritas Jasa Keuangan.
- Sugandini, D., Feriyanto, N., Yuliansyah, Y., Sukwadi, R. & Muafi. (2018). Web Quality, Satisfaction, Trust and Its Effects on Government Website Loyalty. *International Journal for Quality Research*, 12(14), 885–904. <https://doi.org/10.18421/IJQR12.04-07>
- Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. (2021). *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (pertama). Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Tim Penentuan Strategi Kebijakan Pengembangan UMKM Kabupaten Pacitan Jawa Timur. (2021). *Laporan FGD Kabupaten Pacitan*, DPPM UII Yogyakarta.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Tabel 1. Perkembangan Jumlah Unit UMKM dan Usaha Besar (UB)  
Tahun 2015 – 2019**

Indikator	Tahun 2015		Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		
	Jumlah (Unit)	Pangsa (Persen)	Jumlah (Unit)	Pangsa (Persen)	Jumlah (Unit)	Pangsa (Persen)	Jumlah (Unit)	Pangsa (Persen)	Jumlah (Unit)	Pangsa (Persen)
UNIT USAHA (A+B)	59.267.759		61.656.547		62.928.077		64.199.606		65.471.134	
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	59.262.772	99,99	61.651.177	99,99	62.922.617	99,99	64.194.057	99,99	65.465.497	99,99
- Usaha Mikro (UMi)	58.521.987	98,74	60.863.578	98,71	62.106.900	98,70	63.350.222	98,68	64.601.352	98,67
- Usaha Kecil (UK)	681.522	1,15	731.047	1,19	757.090	1,20	783.132	1,22	798.679	1,22
- Usaha Menengah(UM)	59.263	0,10	56.551	0,09	58.627	0,09	60.702	0,09	65.465	0,10
B. Usaha Besar (UB)	4.987	0,01	5.370	0,01	5.460	0,01	5.550	0,01	5.637	0,01

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2020



Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2020

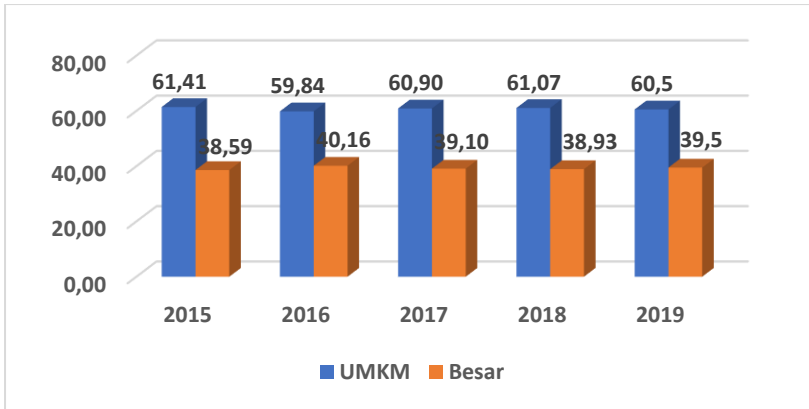
**Gambar 1. Perbandingan Penyerapan Tenaga Kerja di UMKM dan Usaha Besar Tahun 2015-2019 (persen)**

**Tabel 2. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di UMKM (orang) Tahun 2015 –2019, 2020\*, 2024\***

Indikator	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020*	Tahun 2024*
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	123.229.387	112.828.610	116.431.224	116.978.631	119.562.843	125.540.985	119.562.843
-Usaha Mikro (UMi)	110.807.864	103.839.015	105.509.631	107.376.540	109.842.384	115.334.503	109.842.384
- Usaha Kecil (UK)	7.307.503	5.402.073	6.546.742	5.831.256	5.930.317	6.226.833	5.930.317
- Usaha Menengah(UM)	5.114.020	3.587.522	4.374.851	3.770.835	3.790.142	3.979.649	3.790.142

\*Angka Proyeksi

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2020



Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2020

**Gambar 2. Kontribusi UMKM dan Usaha Besar terhadap PDB Atas dasar Harga Berlaku, Tahun 2015 – 2019**

**Tabel 3. Perkembangan Kontribusi UMKM Terhadap PDB  
Atas Dasar Harga Berlaku  
Tahun 2015 – 2020, 2024**

Indikator	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020*	Tahun 2024*
	Jumlah (Miliar rupiah)	Jumlah (Miliar rupiah)	Jumlah (Miliar rupiah)	Jumlah (Miliar rupiah)	Jumlah (Miliar rupiah)	Jumlah (Miliar rupiah)	Jumlah (Miliar rupiah)
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	6.228.285,00	112.828.610	116.431.224	116.978.631	119.562.843	125.540.985	119.562.843
- Usaha Mikro (UMi)	3.841.836,00	103.839.015	105.509.631	107.376.540	109.842.384	115.334.503	109.842.384
- Usaha Kecil (UK)	984.489,00	5.402.073	6.546.742	5.831.256	5.930.317	6.226.833	5.930.317
- Usaha Menengah(UM)	1.401.960,00	3.587.522	4.374.851	3.770.835	3.790.142	3.979.649	3.790.142

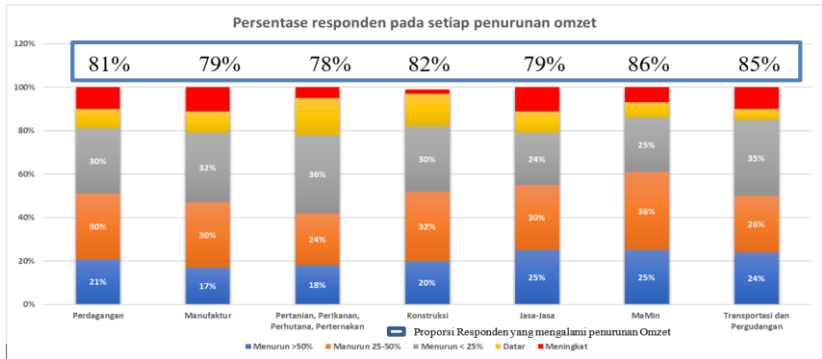
\*Angka Proyeksi

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2020

<p style="text-align: center;"><b>75%</b>  <b>Responden menganggap COVID-19 lebih buruk dari krisis sebelumnya</b></p>	<p style="text-align: center;">Alasan Utama</p>	<p style="text-align: center;">Question</p>
	<p>1. Covid-19 adalah <b>fenomena global</b>, dengan tingkat <b>infeksi yang sangat tinggi</b>, sehingga menimbulkan rasa ketakutan dan kepanikan di masyarakat</p>	<p>“ terjadi secara global dan berkepanjangan”</p> <p>“ pandemi ini menyebar dan menular dengan cara yang sangat sensitif”</p>
	<p>2. Di Indonesia, Pemerintah memberlakukan <b>Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB)</b> yang membatasi pergerakan masyarakat untuk keluar</p>	<p>“ adanya PSBB sehingga orang lebih banyak di rumah</p> <p>“adanya pemberian aturan oleh pemerintah secara massal”</p>
	<p>3. <b>Daya beli konsumen</b> menjadi <b>sangat rendah</b> karena asanya rasa pesimis akan masa depan</p>	<p>“peminat berkurang”</p> <p>“Daya Beli Masyarakat menurun karena terdampak pandemi”</p>
<p>4. Dengan konisi pandemi ini, <b>seluruh perekonomian</b> terlena dampak negatif, baik dari sisi supply maupun demand</p>	<p>“Semua sektor distribusi terkena dampaknya”</p> <p>“semua kalangan terdampak”</p>	

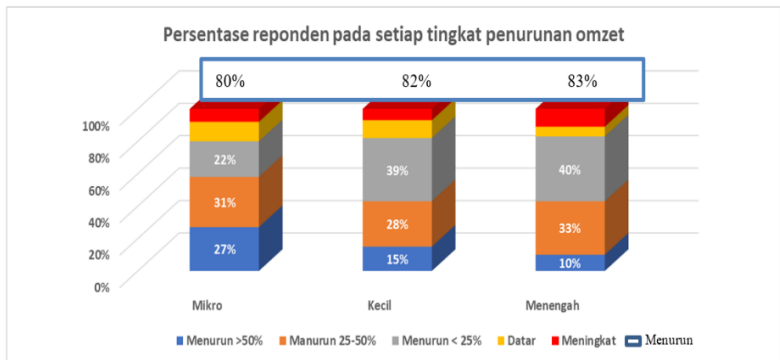
Sumber: OJK-BCG *Joint Research*, 2020

**Gambar 3. Persepsi Umum Responden Terhadap Pandemi COVID-19**



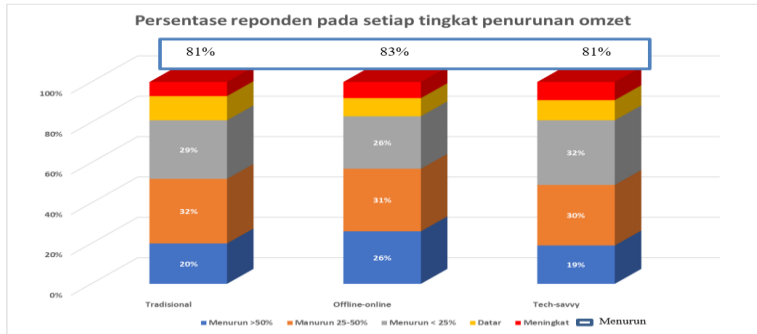
Sumber: OJK-BCG *Joint Research*, 2020

**Gambar 4. Penurunan Omzet Bisnis Berdasarkan Sektor Usaha Akibat Pandemi COVID-19**



Sumber: OJK-BCG *Joint Research*, 2020

**Gambar 5. Penurunan Omzet Bisnis Berdasarkan Ukuran Usaha Akibat Pandemi COVID-19**



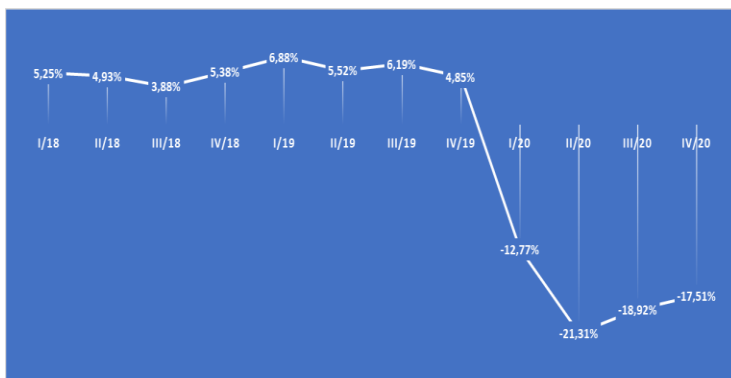
Sumber: OJK-BCG *Joint Research*, 2020

**Gambar 6.** Penurunan Omzet Bisnis Berdasarkan Tingkat Digitalisasi Akibat Pandemi COVID-19



Sumber: OJK-BCG *Joint Research*, 2020

**Gambar 7. Kendala yang Dihadapi UMKM pada Berbagai Area Bisnis**



Sumber: Dafei et al., 2020

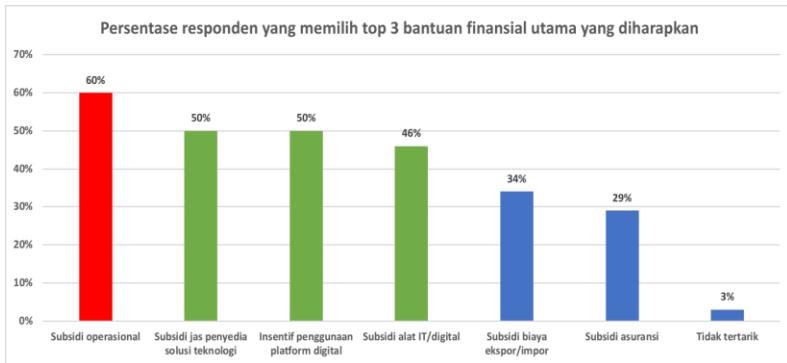
**Gambar 8.** Pertumbuhan Produksi Industri Kecil Menengah (y-on-y), Triwulan I-2018 s.d. Triwulan IV-2020

**Tabel 4.** Pertumbuhan Produksi Triwulanan (y-on-y) Industri Mikro dan Kecil Menurut Provinsi, 2019 – 2020 (2010=100)

Provinsi	2019		2020			
	Trw. III	Trw. IV	Trw. I	Trw. II	Trw. III	Trw. IV
Aceh	15,39	13,53	-9,7	-10,76	-3,67	-9
Sumatera Utara	6,45	9,37	-8,94	-20,52	-17,61	-15,47
Sumatera Barat	15,91	4,94	-15,25	-7,32	-19,5	-13,39
Riau	4,81	2,91	-11,48	-18,28	-11,4	-15,18
Jambi	3,33	2,59	-10,92	-19,98	-16,16	-8,93
Sumatera Selatan	13,79	11,76	-6,82	-17,55	-17,13	-13,73
Bengkulu	4,13	0,13	-11,93	-11,43	-2,24	6,55
Lampung	1,15	7,73	-13,98	-22,11	-21,14	-22
Kep. Bangka Belitung	4,93	2,26	-18,49	-20,2	-22,4	-20,76
Kep. Riau	25,67	17	5,53	1,89	-0,5	-0,41

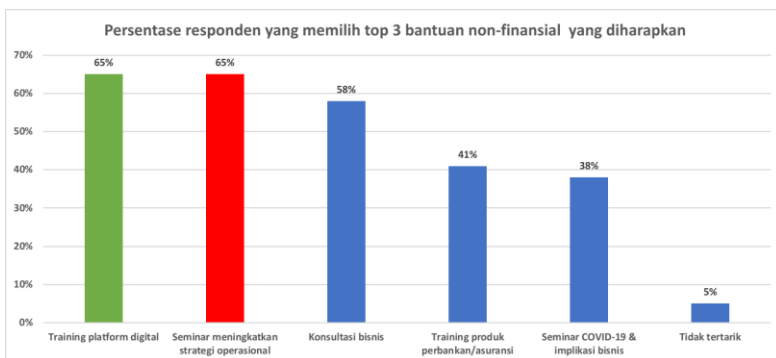
Provinsi	2019		2020			
	Trw. III	Trw. IV	Trw. I	Trw. II	Trw. III	Trw. IV
DKI Jakarta	7,34	5,87	-15,04	-30,61	-28,61	-28,23
Jawa Barat	7,53	6,29	-12,56	-26,58	-19,02	-20,07
Jawa Tengah	3,92	3,97	-12,56	-24,9	-22,23	-19,93
DI Yogyakarta	0	3,42	-14,06	-20,85	-16,95	-11,93
Jawa Timur	6,67	11,21	6,15	-5,09	0,26	1,84
Banten	10,13	10,28	-4,22	-17,88	-22,18	-27,14
Bali	10,25	10,85	-21,09	-28,39	-25,61	-24,49
NTB	8,43	2,02	-17,44	-19,24	-14,45	-12,99
NTT	30,32	20,98	-2,08	-10,8	-15,85	-16,27
Kalimantan Barat	8,53	-1,28	-14,53	-18,45	-18,66	-11,62
Kalimantan Tengah	7,94	8,13	-16,28	-24,32	-20,27	-14,13
Kalimantan Selatan	5,57	3,52	-10,18	-11,38	-12,35	-12,34
Kalimantan Timur	14,59	12,04	-2,9	-6,53	-8,87	-11,09
Kalimantan Utara	8,47	9,32	-11,31	-6,58	-10,02	-7,98
Sulawesi Utara	8,42	-2,95	-12,85	-20,21	-13,11	-7,54
Sulawesi Tengah	11,43	25,25	-5,67	-7,35	11,69	19,18
Sulawesi Selatan	15,92	16,1	-10,03	-8,39	-0,6	7,79
Sulawesi Tenggara	15,24	13,99	-6,2	-10,13	1,39	0,92
Gorontalo	27,26	22,61	-14,75	-18,32	-11,1	-7,52
Sulawesi Barat	0	29,74	22,12	13,27	9,81	10,13
Maluku	15,82	15	-6,12	-26,31	-26,07	-24,93
Maluku Utara	0	4,35	-4,95	2,33	0,05	3,56
Papua Barat	23,08	19,45	-0,63	-0,68	1,67	2,19
Papua	15,88	10,53	2,99	-20,59	8,44	7,61
INDONESIA	6,19	4,85	-12,77	-21,31	-18,92	-17,51

Sumber: Dafei et al., 2020



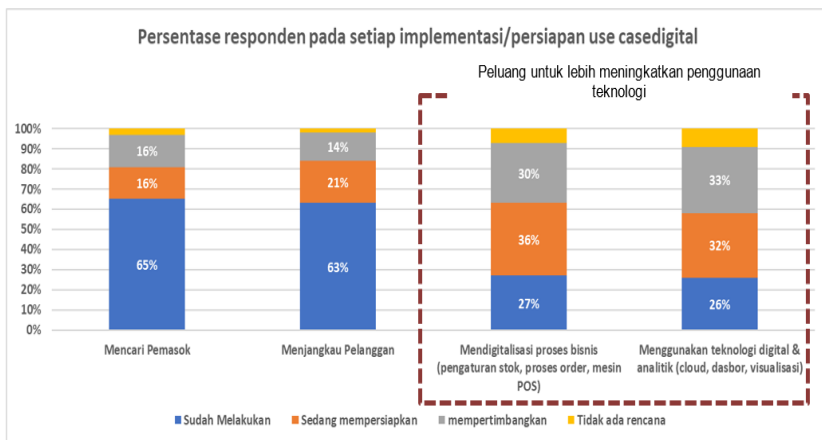
Sumber: OJK-BCG *Joint Research*, 2020

**Gambar 9. Bantuan Finansial yang Diharapkan UMKM**



Sumber: OJK-BCG *Joint Research*, 2020

**Gambar 10. Bantuan non-Finansial yang Diharapkan UMKM**



Sumber: OJK-BCG *Joint Research*, 2020

**Gambar 11. Tingkat Implementasi dan Persiapan UMKM pada Setiap Use Case Digital**



Sumber: Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

**Gambar 12. Tiga Pilar Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Indonesia**



Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas, 2017

**Gambar 13.** *Sustainable Development Goals (SDGs)*

## BIODATA



### Identitas Diri

1	Nama Lengkap	<b>Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si</b>
2	Jabatan Fungsional	Guru Besar/ IV B
3	NIP/NIK	196002201986031001/ 853110201
4	NIDN	0020026001
5	Tempat dan Tanggal lahir	Yogyakarta, 20 Februari 1960
6	Alamat Rumah	Jl Pamularsih 150 B, Klaseman, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7	No Telepon/Hp	0811282632
8	Alamat Kantor	Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
9	No Telepon/Fax	274 881546/ 274 882589
10	Alamat email	nur.feriyanto@uii.ac.id

## A. Keluarga

Isteri : Dyah Anggraini Dwi Putranti, S.E

Anak : 1. Ferdyani Yulia Atika Putri, S.E  
2. Donny Aryanto Prabowo, S.T

## B. Riwayat Pendidikan

Program	S1	S2	S3
Nama PT	UII	UGM	Unair
Bidang Ilmu	Ekonomi Perusahaan	Ilmu Ekonomi	Ilmu Ekonomi
Tahun Masuk	1979	1996	2007
Tahun Lulus	1984	1997	2011
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Efisiensi Penanaman Modal Kerja pada Perusahaan Timbangan UNI di Yogyakarta	Analisis Ketenagakerjaan pada Industri Manufaktur Tekstil di Indonesia	Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Ekspor, Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia
Nama Pembimbing	Drs. Indriyo Gitosudarmo, M.Com	Drs. Adnan Hajam, MA	Prof. Dr. Djoko Mursinto, S.E, M.Ec

### C. Riwayat Jabatan

No	Jabatan	Tahun
1	Sekretaris Jurusan Manajemen FE UII	1994
2	Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII	1994-1996
3	Kepala Bidang Administrasi & Anggaran MM FE UII	2001-2006
4	Direktur Keuangan dan Anggaran UII	2006-2007
5	Wakil Rektor II UII	2014-2018

### D. Penghargaan yang pernah diraih 10 Tahun Terakhir

No	Bentuk Penghargaan	Tahun
1	Satya Lancana Karya Satya XX Tahun No. 56/TK/Tahun 2013	2013
2	Dosen Rangking II Berdasarkan Nilai Kinerja Dosen Mengajar (NKDM) Prodi Ilmu Ekonomi	2016
2	Satya Lancana Karya Satya XXX Tahun No. 35/TK/Tahun 2017	2017
3	Dosen Terbaik Berdasar Nilai Kinerja Dosen Mengajar (NKDM) Prodi Ilmu Ekonomi	2020

### E. Pemateri pada Berbagai Workshop/Pelatihan

No	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Tahun
1	Induksi Sistem Penjaminan Mutu Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan UII	Universitas Islam Indonesia	2015
2	Analisis Makro Ekonomi DIY	Pemda DIY	2015
3	Analisis PDRB DIY 2011-2015	Pemda DIY	2016
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Pengendali Sistem Mutu dan Sekretaris Program Studi di Lingkungan UII	Universitas Islam Indonesia	2016

5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Bagi Pengelola Unit Penjaminan Mutu	RISTEKDIKTI dan UII	2018
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota/Kecamatan di DIY Tahun 2013-2018	Pemda DIY	2019
7	Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Selama Pandemi	RS Soeradji Tirtonegoro Klaten	2021

#### **F. Karya Ilmiah yang Terbit pada Jurnal Nasional & Internasional**

- Feriyanto, N. (2016). The Effect of Employment, Economic Growth, and Investment on HDI: In provinces in Indonesia. *Journal of Economics Business and Accountancy Ventura*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.14414/jebav.v19i1.537>
- Feriyanto, N. (2016). Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidorejo Kabupaten Purworejo Melalui Penguatan Kelembagaan Berbasis Pengembangan Potensi Lokal. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Volume 1 Issue 3, pp 210-218.
- Feriyanto, N. (2016). Imbalanced Relationship Between Regional Economic Growth and Income percapita: An empirical analysis in Yogyakarta special province. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, Volume 14, Issue 10, pp 6739-6754.
- Feriyanto, N. & Sriyana, J. (2016). Labor Absorption Under Minimum Wage Policy In Indonesia. *Regional Science Inquiry*, VIII(1), 11–21.
- Feriyanto, N., Saleh, C., Ulandari, S., Deros (2016). Supply Chain Framework for Selling Halal Meat in Retail Business: A case study. *International Business Manajemen*, Volume 10(19), pp 4684-4689.

- Feriyanto, N., Maharika, IF., & Firdaus, F. (2017). Diversifikasi Komoditas Pangan Unggulan Lokal Berbasis Agropolitan di Daerah Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta. *Teknoin*, 23 (2).
- Feriyanto, N. (2018). Determinants of unemployment in Regency/City in Special Province Yogyakarta. *European Research Studies Journal*, XXI (3), 367–380. <https://doi.org/10.35808/ersj/1388>
- Sugandini, D., Feriyanto, N., Yuliansyah, Y., Sukwadi, R. & Muafi. (2018). Web quality, satisfaction, trust and its effects on government website loyalty. *International Journal for Quality Research*, 12(14), 885–904. <https://doi.org/10.18421/IJQR12.04-07>
- Feriyanto, N. (2019). The Effect of The Quality of Human Development Factors On The Rate of Economic Growth In Yogyakarta Special Province. *International Journal for Quality Research*, 13(1), 157-176.
- Feriyanto, N., Kot Sebastian., Sugandhi, D., & Muafi (2019). The Development of Community Based Tourism from Attractiveness to Loyalty, *Quality Access to Success*, Volume 20, Issues S1, 393-398.
- Feriyanto, N., Sugandini, D. & Muafi. (2019). Supply Chain Performance: The Study on Bamboo Craft SMEs in Special Region of Yogyakarta. *Quality-Access to Success*, 20(173), 43–47
- Feriyanto, N. (2020). Economic and Tourism Factors Affecting the Real Gross Regional Domestic Product: A Case Study in Yogyakarta Special Province. *European Research Studies*, Volume 23, Issues 3, pp 736-756.
- Feriyanto, N., Aiyubbi, D. El & Nurdany, A. (2020). The Impact of Unemployment, Minimum Wage, and Real Gross Regional Domestic Product on Poverty Reduction in Provinces of Indonesia. *Asian Economic and Financial Review*, 10(10), 1088–1099. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.1010.1088.1099>

## G. Penulis Buku

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2014	Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia	UPP STIM YKPN ISBN:978-979-3532-87-5
2021	Rekayas Perbaikan Lintas Sektor, Disparitas Ekonomi dan Perubahan Struktural Ekonomi Kabupaten Kulon Progo D.I.Yogyakarta	Universitas Islam Indonesia ISBN: 978-602-450-606-3 E-ISBN: 978-602-450-607-0 (PDF)
2021	Potensi Ekonomi Kabupaten Pacitan Jawa Timur Penyusunan Strategi Pemberdayaan Produk Hasil Pertanian dan Perikanan di Era Industri 4.0	Universitas Islam Indonesia ISBN: 978-602-450-653-7 E-ISBN:978-602-450-654-4 (PDF)

## H. Perolehan HKI

	Judul HKI	No Pencatatan	Tahun
1	Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia	02521	2014
2	Rekayas Perbaikan Lintas Sektor, Disparitas Ekonomi dan Perubahan Struktural Ekonomi Kabupaten Kulon Progo D.I.Yogyakarta	000261810	2021

Yogyakarta, 25 November 2021



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Gedung GBPH Prabuningrat  
Jl. Kaliurang km 14.5, Sleman, Yogyakarta 55584  
Telp. (0274) 898444, fax (0274) 898459  
Email : [info@uii.ac.id](mailto:info@uii.ac.id), website : [www.uii.ac.id](http://www.uii.ac.id)